



Governance Failure Dalam Pengelolaan Dana Bos: Perspektif Coso dan Fraud Triangle

Mutiara Ananda Tongku¹, Saidun Hutasuht², Chandra Situmeang³

^{1,2,3}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi,
Universitas Negeri Medan,

Penulis Korespondensi: Mutiara Ananda Tongku
e-mail: mtiaratongku.7256163003@mhs.unimed.ac.id

e-mail :

mtiaratongku.7256163003@mhs.unimed.ac.id¹,

saidun@unimed.ac.id²,

chandrasitumeang@gmail.com³

ARTIKEL INFO

Artikel History:

Menerima: 25 Jun 2026

Diterima 02 Agus 2026

Tersedia Online: 25 Sep 2026

Kata kunci :

Audit Internal, Pengendalian Internal, Fraud Triangle, COSO Framework

ABSTRAK

Dalam kajian ini, identifikasi terhadap faktor-faktor yang relevan ditujukan untuk meningkatkan risiko fraud dana BOS serta mengevaluasi kelemahan tata kelola keuangan pendidikan. Dalam kajian ini, pendekatan kualitatif deskriptif diterapkan dengan metode studi literatur yang dipadukan dengan content analysis terhadap kasus-kasus pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Analisis dilakukan menggunakan komponen COSO dan fraud triangle. Hasil menunjukkan bahwa lemahnya pengendalian internal, rendahnya transparansi, tidak optimalnya audit internal, serta sentralisasi kewenangan dalam pengelolaan keuangan diidentifikasi sebagai faktor dominan yang meningkatkan risiko fraud dana BOS. Selain itu, kelemahan pada control environment, control activities, dan monitoring activities menyebabkan deteksi dini terhadap penyimpangan belum berjalan efektif. Penelitian ini berkontribusi melalui analisis integratif berbasis COSO dan fraud triangle dalam memahami governance failure pada pengelolaan dana BOS. Implikasi penelitian menekankan pentingnya audit berbasis risiko, pengendalian internal yang efektif, serta penggunaan whistleblowing system dan data analytics.

ARTICLE INFO

Article History:

Received: 25 Jun 2026

Accepted: 02 Aug 2026

Available Online: 25 Sep 2026

Keywords:

Internal Audit, Internal Control, Fraud Triangle, COSO Framework,

ABSTRACT

In this study, the identification of relevant factors in aimed at increase the risk of BOS fund fraud and evaluate weaknesses in educational financial governance. This study employs a descriptive qualitative approach, utilizing a literature review method combined with content analysis of cases regarding the management of School Operational Assistance (BOS) funds. The analysis was conducted using COSO and fraud triangle components. The results indicate that weak internal control, low transparency, suboptimal internal audit, and centralization of authority in financial management are dominant factors that increase the risk of BOS fund fraud. Furthermore, weaknesses in the control environment, control activities, and monitoring activities result in ineffective early detection of irregularities. This study contributes through an integrative analysis based on COSO and the fraud triangle to understanding governance failure in BOS fund management. The implications of the research emphasize the importance of risk-based audits, effective internal controls, and the use of whistleblowing systems and data analytics..



1. PENDAHULUAN

Lembaga pendidikan memiliki peran strategis dalam pembangunan sumber daya manusia serta peningkatan kualitas pendidikan nasional. Dalam menjalankan fungsi tersebut, sekolah mengelola berbagai sumber pendanaan, salah satunya Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diberikan pemerintah untuk mendukung kegiatan operasional pendidikan. Besarnya dana yang dikelola harus jelas, akuntabel, efektif, dan efisien. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai penyimpangan dalam pengelolaan dana BOS, seperti manipulasi laporan keuangan, penggelembungan anggaran, penyusunan laporan pertanggungjawaban fiktif, hingga penggunaan dana yang tidak sesuai peruntukan (Ditia et al, 2026). Fenomena tersebut menunjukkan bahwa sektor pendidikan masih menghadapi kerentanan terhadap praktik fraud akibat lemahnya sistem pengawasan dan tata kelola organisasi.

Fenomena penyalahgunaan dana pendidikan menunjukkan bahwa sektor pendidikan masih rentan terhadap praktik fraud dan lemahnya tata kelola keuangan. Beberapa kasus korupsi dana BOS di Indonesia, seperti yang terjadi pada SMPN 9 Ambon, SMKN 2 Kisaran, dan SMAN 10 Bandung. Kerentanan tersebut diperkuat oleh temuan Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2024 yang dirilis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berdasarkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2024 yang dirilis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, penyelewengan dana BOS bukan satu-satunya masalah. Sekitar 17% lembaga pendidikan masih memungut biaya yang melanggar hukum, 40% menunjukkan tanda-tanda nepotisme dalam pengadaan barang dan jasa, dan 47% dianggap melakukan pembayaran berlebihan. Pelanggaran seperti laporan fiktif dan pemalsuan dokumen bahkan masih terjadi di 42% sekolah. (kpk.go.id). Kondisi ini mengindikasikan bahwa sistem pengendalian internal dan mekanisme pengawasan pada lembaga pendidikan belum berjalan secara optimal. Dalam perspektif COSO framework, lemahnya control environment, control activities, dan monitoring activities dapat menciptakan peluang terjadinya fraud dalam organisasi sektor publik, termasuk lembaga pendidikan. Oleh karena itu, penguatan tata kelola dan pengendalian internal menjadi kebutuhan mendesak untuk meminimalkan risiko penyalahgunaan dana pendidikan.

Salah satu cara penting untuk mendorong tata kelola organisasi yang baik adalah audit internal. Menurut Institute of Internal Auditors (2026), audit internal adalah tindakan dan konsultasi independen yang bertujuan untuk meningkatkan nilai dan efisiensi operasional organisasi. Audit internal dilakukan di lembaga pendidikan untuk menjamin kepatuhan pengelolaan dana BOS terhadap berbagai regulasi yang berlaku serta prinsip-prinsip akuntabilitas publik. Pengendalian internal, bersama dengan audit internal, menjalankan fungsi yang signifikan dalam upaya pencegahan dan deteksi praktik kecurangan. COSO menyatakan bahwa pengendalian internal sebagai proses yang dieksekusi oleh manajemen organisasi secara holistik bersama seluruh stakeholder internal untuk menyediakan assurance yang layak terhadap pencapaian tujuan organisasi, terutama dalam aspek efektivitas operasional, keakuratan pelaporan finansial, dan kepatuhan regulasi. Dalam perspektif agency theory, kepala sekolah sebagai pihak yang diberi kewenangan mengelola dana BOS memiliki akses informasi dan otoritas yang lebih besar dibanding pemerintah maupun masyarakat sebagai principal. Ketimpangan informasi tersebut dapat menimbulkan asymmetric information yang berpotensi menciptakan peluang terjadinya fraud apabila tidak diimbangi dengan sistem pengawasan dan pengendalian yang memadai (Jensen & Meckling, 1976).

Penelitian terdahulu umumnya membahas fraud dana BOS dan fraud sektor pendidikan secara parsial. Sofyani et al. (2022) menemukan bahwa kelemahan implementasi pengendalian internal berbasis COSO pada perguruan tinggi menyebabkan meningkatnya risiko fraud dan menurunkan kualitas tata kelola organisasi. Widati et al. (2023) lebih berfokus pada lemahnya sistem pengendalian internal dalam pengelolaan dana BOS meningkatkan potensi penyalahgunaan

dana pendidikan, sedangkan Carolina dan Haneda (2022) menyoroti peran audit internal dalam pencegahan fraud. Penelitian lain seperti Lubis et al. (2024) dan Nadirsyah et al. (2024) juga lebih banyak menempatkan audit internal dan pengendalian internal sebagai faktor terpisah dalam menjelaskan fraud sektor publik. Dengan demikian, penelitian sebelumnya masih cenderung melihat fraud dana BOS dari satu perspektif tertentu dan belum menjelaskan keterkaitan antar faktor tata kelola secara komprehensif.

Penelitian mengenai fraud sektor pendidikan telah banyak dilakukan. Namun, masih terbatas penelitian yang mengintegrasikan dominasi kekuasaan kepala sekolah, governance failure, pengendalian internal berbasis COSO, fraud triangle, dan audit internal dalam satu kerangka analisis yang komprehensif. Sebagian besar penelitian sebelumnya cenderung menyoroti aspek pengendalian internal atau audit internal secara terpisah tanpa menjelaskan hubungan antar faktor yang membentuk peluang terjadinya fraud dana BOS. Padahal, kasus-kasus fraud dana BOS menunjukkan bahwa penyimpangan cenderung dipengaruhi oleh lemahnya kontrol organisasi, tetapi juga oleh dominasi kekuasaan dalam pengambilan keputusan keuangan serta lemahnya mekanisme monitoring dan transparansi. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan pendekatan integratif dengan menggabungkan perspektif governance failure, fraud triangle theory, COSO framework, dan efektivitas audit internal untuk menjelaskan pola terjadinya fraud dana BOS pada lembaga pendidikan. Penelitian ini tidak hanya membahas kelemahan pengendalian internal, tetapi juga mengaitkannya dengan dominasi kekuasaan kepala sekolah sebagai faktor yang memperbesar opportunity dalam fraud triangle. Dengan demikian, penelitian ini menempatkan fraud dana BOS sebagai bentuk kegagalan sistemik tata kelola organisasi pendidikan, bukan semata-mata kesalahan individu.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana dominasi kekuasaan, lemahnya pengendalian internal, dan kegagalan audit internal menciptakan peluang terjadinya fraud dana BOS di lembaga pendidikan serta mengevaluasi kelemahan tata kelola berdasarkan COSO framework dan fraud triangle theory. Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi berupa pengembangan kerangka analisis fraud dana BOS yang lebih integratif. Secara praktis, penelitian ini bertujuan untuk memberikan saran kepada pemerintah, sekolah, dan auditor internal tentang cara memperkuat mekanisme pengendalian, keterbukaan, dan tanggung jawab dalam pengelolaan dana pendidikan.

2. STUDI LITERATUR

Fraud triangle theory

Tiga faktor yang mendorong seseorang melakukan *fraud* menurut Cressey (1953) yang dikutip oleh Sudarmanto et al (2021), yaitu *pressure*, *opportunity*, dan *rationalization*. *Pressure* dalam pengelolaan dana BOS dapat muncul akibat tuntutan operasional sekolah yang tinggi, keterbatasan anggaran, tekanan mempertahankan citra sekolah, serta ekspektasi pemangku kepentingan terhadap pencapaian program pendidikan. Dalam praktiknya, kepala sekolah dan bendahara sering menghadapi tekanan untuk memenuhi kebutuhan operasional yang tidak seluruhnya dapat dibiayai oleh dana BOS sehingga mendorong manipulasi laporan atau pengalihan anggaran. Amin et al (2023) menemukan bahwa tekanan finansial dan lemahnya integritas organisasi berpengaruh terhadap kecenderungan *fraud* dalam pengelolaan dana BOS pada sekolah menengah. Penelitian Rohman et al (2023) juga menunjukkan bahwa tekanan organisasi dan budaya permisif meningkatkan risiko penyalahgunaan dana pendidikan. *Opportunity* berkaitan dengan lemahnya sistem pengawasan dan pengendalian internal. Dalam pengelolaan dana BOS, peluang *fraud* sering muncul akibat dominasi kepala sekolah, tidak adanya pemisahan tugas,

lemahnya monitoring, serta rendahnya transparansi laporan keuangan. Sementara itu, *rationalization* menjelaskan bagaimana pelaku membenarkan tindakannya. Dalam praktik pengelolaan dana BOS, pelaku sering menganggap manipulasi laporan sebagai tindakan “sementara” demi kepentingan sekolah atau untuk menutupi kekurangan anggaran operasional. *Rationalization* juga diperkuat oleh budaya organisasi yang permisif terhadap pelanggaran administratif kecil. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa *fraud* cenderung dipicu lemahnya integritas dan budaya etika organisasi pendidikan.

Agency Theory

Agency theory menjelaskan hubungan antara *principal* dan *agent* yang memiliki kepentingan berbeda. Teori keagenan (*agency theory*) menjelaskan bahwa sering terjadi *information asymmetry* antara pihak agen, yaitu kepala sekolah sebagai pengelola yang memiliki akses lebih besar terhadap informasi, dengan pihak prinsipal, yaitu warga sekolah sebagai pihak yang berkepentingan terhadap pengelolaan tersebut (Melinda et al, 2023). Informasi yang didistribusikan secara asimetris akan menguntungkan agen (Wismawati et al, 2024). Menurut Amin et al (2022) sebagai pihak yang diberi kewenangan mengelola dana BOS, sekolah wajib mempertanggungjawabkan penggunaan dana secara transparan kepada Dinas Pendidikan dan masyarakat. Dalam praktiknya, kepala sekolah memiliki akses informasi, otoritas, dan kontrol lebih besar dibanding komite sekolah maupun masyarakat. Penelitian Rahayu et al. (2025) menunjukkan bahwa lemahnya transparansi dan rendahnya pengawasan internal memperbesar peluang *fraud* dalam pengelolaan dana pendidikan. Selain itu, Taihuttu & Yanti (2025) menemukan bahwa konsentrasi kekuasaan pada kepala sekolah memperkuat peluang terjadinya *abuse of authority* dalam pengelolaan dana BOS. Dengan demikian, *agency theory* memberikan landasan teoritis yang kuat bahwa *fraud* dana BOS tidak hanya disebabkan kelemahan teknis pengendalian, tetapi juga konflik kepentingan dan ketimpangan kekuasaan dalam organisasi sekolah.

Audit Internal

Dalam konteks organisasi, audit internal direpresentasikan sebagai proses evaluasi yang dijalankan secara independen dan objektif dengan tujuan utama penilaian terhadap efektivitas pengelolaan organisasi, yang mencakup aspek manajemen risiko, mekanisme pengendalian internal, serta struktur tata kelola organisasi. Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh The Institute of Internal Auditors (IIA) sebagaimana direferensikan oleh Louwers et al. (2018), audit internal didefinisikan sebagai aktivitas *assurance* dan konsultasi yang dibentuk untuk menawarkan nilai tambah serta mengintensifkan efektivitas operasional organisasi. Dalam perspektif Moroney et al. (2017), audit internal berperan dalam proses penilaian dan peningkatan efektivitas manajemen risiko, sistem pengendalian internal, dan *governance* organisasi. Berdasarkan kerangka konseptual tersebut, audit internal dapat dirumuskan sebagai fungsi independen dalam struktur organisasi yang berkontribusi dalam peningkatan kinerja organisasi melalui mekanisme evaluasi dan penyampaian rekomendasi perbaikan. Dalam konteks praktis, audit internal menjalankan fungsi yang signifikan dalam menjamin operasional pengendalian internal secara efektif sebagai upaya pencegahan *fraud*. Pelaksanaan audit internal dilakukan melalui mekanisme perlindungan aset, optimalisasi efisiensi dan efektivitas operasional, penjaminan keandalan informasi, serta penerapan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku (Hakim & Suryatimur, 2022). Sehubungan dengan hal tersebut, kontribusi auditor internal tidak terbatas pada fungsi deteksi kesalahan, melainkan juga difungsikan sebagai instrumen preventif dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya penyimpangan di lingkungan organisasi.

Pengendalian Internal

Guna memastikan jaminan yang memadai tentang pencapaian tujuan perusahaan, manajemen dan seluruh bagian organisasi merancang dan menerapkan proses yang dikenal sebagai pengendalian internal. Menurut COSO yang dikutip oleh Kagermann et al. (2008), pengendalian internal bertujuan memastikan keandalan laporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasional, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Louwers et al. (2018) dan Moroney et al. (2017) juga menjelaskan bahwa pengendalian internal merupakan proses terstruktur yang dirancang untuk mendukung efektivitas tata kelola organisasi dan meminimalkan risiko organisasi. Berdasarkan beberapa definisi tersebut, pengendalian internal dapat disintesiskan sebagai proses berkelanjutan yang dijalankan seluruh elemen organisasi untuk mendukung tercapainya tujuan organisasi secara efektif, efisien, dan sesuai regulasi. Untuk mengelola dana BOS, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) juga diperlukan agar pengelolaan dana BOS dapat berjalan dengan semestinya tanpa adanya *fraud* di dalamnya (Setiawan & Sari, 2025). Berdasarkan kerangka COSO, sistem pengendalian internal diartikulasikan ke dalam lima komponen esensial, meliputi *control environment*, *risk assessment*, *control activities*, *information and communication*, serta *monitoring activities* (Arens et al., 2017). *Control environment* mencerminkan integritas dan komitmen organisasi terhadap tata kelola yang baik. Menurut Yuningssi et al (2026) lingkungan yang baik diyakini dapat memperkuat efektivitas audit internal dan sistem pengendalian internal dalam mencegah *fraud*, sedangkan lingkungan yang buruk dapat melemahkannya. *Risk assessment* merupakan proses untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai potensi ancaman yang dapat menghambat pencapaian tujuan (Munifah, 2023). *Control activities* membantu organisasi dalam mengurangi risiko melalui berbagai tindakan pengendalian yang sistematis (Agoes, 2019). Menurut Moroney et al (2027), informasi yang akurat dan tepat waktu diperlukan pada seluruh tingkat organisasi untuk mendukung pencapaian tujuan operasional, pelaporan keuangan, dan kepatuhan melalui komunikasi yang efektif. Dan aktivitas pemantauan merupakan proses penilaian yang dilakukan secara berkelanjutan maupun berkala oleh manajemen untuk menilai kualitas dan efektivitas pelaksanaan pengendalian internal (Arens et al, 2017).

Fraud Detection

Menurut Arens et al. (2017), *fraud* umumnya dipengaruhi oleh tiga faktor utama yang dikenal sebagai *fraud triangle*, yaitu *pressure*, *opportunity*, dan *rationalization*. Tekanan adalah keadaan yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan curang secara finansial atau non-finansial. Kegagalan pengendalian internal, seperti pengawasan yang tidak memadai dan kurangnya pemisahan tugas, menciptakan peluang. Sebaliknya, rasionalisasi adalah istilah yang mengacu pada alasan yang digunakan pelaku untuk mendukung keputusannya sendiri. Dalam konteks lembaga pendidikan, ketiga faktor tersebut dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan dana pendidikan apabila tidak didukung sistem pengendalian internal dan pengawasan yang efektif. *Fraud detection* dalam profesi audit tidak hanya dipahami sebagai upaya menemukan pelaku kecurangan, tetapi juga sebagai kompetensi auditor dalam mengenali indikasi *fraud* sejak dini, mengidentifikasi area berisiko tinggi, serta mengevaluasi bukti secara kritis untuk memperoleh keyakinan yang memadai (Asrini, 2026). Kemampuan ini penting karena kecurangan sering kali tersembunyi di balik transaksi yang tampak normal dan dokumen yang terlihat valid. Oleh karena itu, auditor dituntut memiliki skeptisisme profesional dan kemampuan mengenali *red flags* melalui prosedur audit yang tepat, seperti pengujian konsistensi informasi dan analisis kewajaran transaksi.

3. METODE RISET

Dalam kajian ini, pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur yang dipadukan dengan content analysis terhadap kasus-kasus pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Data penelitian berasal dari data sekunder berupa artikel ilmiah nasional dan internasional, buku, serta berita resmi terkait kasus fraud dana BOS di Indonesia. Sumber literatur diperoleh dari jurnal terindeks SINTA dan Scopus dengan rentang publikasi 2020–2025. Berita resmi diperoleh melalui situs resmi KPK dan media massa nasional maupun daerah. Pencarian data dilakukan menggunakan kata kunci seperti "fraud dana BOS", "penyelewengan dana BOS", "korupsi dana BOS", dan "penyalahgunaan dana BOS" selama periode penelitian. Kata kunci tersebut dipilih karena menggambarkan berbagai bentuk kecurangan dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), sehingga dapat membantu memperoleh data yang relevan dengan penelitian.

Pada tahap seleksi diperoleh 23 artikel ilmiah, 7 buku, 1 laporan resmi KPK, website resmi IIA, dan 5 berita resmi mengenai fraud dana BOS. Artikel ilmiah, buku, dan laporan resmi digunakan sebagai referensi konseptual dan pembandingan terhadap hasil analisis, sedangkan objek yang dianalisis melalui teknik content analysis terdiri atas lima kasus fraud dana BOS yang dipilih berdasarkan relevansi dengan tujuan penelitian, kelengkapan informasi, dan tingkat kredibilitas sumber. Analisis data dilakukan dengan menerapkan teknik content analysis. Teknik content analysis berperan dalam mendeteksi dan mengidentifikasi pola penyimpangan, kelemahan pengendalian internal, dan bentuk fraud dalam pengelolaan dana BOS. Tahapan analisis dilakukan melalui: (1) identifikasi kasus fraud dana BOS, (2) klasifikasi modus fraud, (3) analisis berdasarkan komponen COSO framework, (4) analisis berdasarkan fraud triangle theory, dan (5) sintesis temuan untuk menjelaskan hubungan governance failure dengan risiko fraud pada lembaga pendidikan BOS di Indonesia.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dana BOS merupakan bantuan pemerintah pusat yang ditujukan untuk membiayai operasional sekolah dan mengurangi beban biaya pendidikan bagi peserta didik. Berikut ini kasus *fraud* yang pernah terjadi dalam penggunaan dana BOS di sekolah:

Tabel 1. Daftar Kasus Dana BOS di Sekolah

Nama Sekolah	Deskripsi Kasus
SMP Negeri 9 Ambon	Pengelolaan dana BOS di SMPN 9 Ambon selama empat tahun dari 2020–2023 dilakukan secara tertutup oleh terdakwa LP bersama bendahara sekolah, YP dan ML, tanpa melibatkan tim sekolah lainnya. Modus operasi yang digunakan meliputi pembuatan laporan pembelanjaan fiktif, manipulasi pembayaran honor Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT), dan pelaksanaan kegiatan yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban sah. Sebagai informasi, dalam periode tersebut SMPN 9 Ambon menerima kucuran dana BOS dengan total sekitar Rp5,8 miliar dan hampir Rp1,9 miliar diselewengkan. Sumber: https://ambonterkini.id/news_read/korupsi-dana-bos-kepsek-smpn-9-ambon-dituntut-9-ta-4731

SMK Negeri 2 Kisaran	Z menyalahgunakan dana BOS saat menjabat sebagai kepala sekolah dengan melakukan pembelian bahan langsung tanpa melibatkan kepala program, serta mencairkan dana yang hanya diketahui dirinya dan bendahara tanpa transparansi. Ia juga tidak menyalurkan dana sesuai RKAS, tidak menyusun laporan pertanggungjawaban (LPJ), dan tidak melibatkan tim BOS maupun Komite Sekolah. Akibatnya, penggunaan dana tidak sesuai peruntukan dan mengganggu operasional sekolah. Sumber: https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6665228/korupsi-dana-bos-rp-900-juta-eks-kepsek-smk-2-kisaran-dituntut-7-tahun-bui
SMP Negeri 1 Pallangga	Penggunaan dana BOS dilaporkan secara fiktif dan tidak sesuai kondisi nyata. Sejumlah item dalam laporan pertanggungjawaban terbukti tidak sesuai peruntukan, dengan transaksi fiktif sekitar Rp923 juta untuk ATK, penggandaan soal, komputer, serta konsumsi. Selain itu, terdapat dugaan tambahan penggandaan soal fiktif senilai Rp451 juta atas penggandaan soal ulangan harian melalui perusahaan milik tersangka sendiri. Sumber: https://www.metrotvnews.com/read/NP6C3xea-tilap-dana-bos-rp1-3-miliar-kejari-gowa-tahan-kepsek-smpn-1-pallangga
SD Negeri 23 Maluku Tengah	SAT selaku kepala sekolah melakukan pelanggaran hukum dengan mengambil alih seluruh pengelolaan dana BOS tanpa melibatkan bendahara, mulai dari perencanaan (RKAS), pencairan, hingga pelaporan. Pengelolaan dana yang dicairkan berada di bawah kendali penuh kepala sekolah, sementara distribusi alokasi kepada bendahara dibatasi pada jumlah yang terbatas untuk pemenuhan kebutuhan operasional. Selain itu, tersangka juga memerintahkan pembuatan laporan fiktif, termasuk pemalsuan tanda tangan, serta menggunakan dana tidak sesuai RKAS dan petunjuk teknis BOS. Sumber: https://malteng.liputan.co.id/article_read/jaksa-tetapkan-kepala-sd-negeri-23-malteng-s-a-t-s1762865755
SMAN 10 Bandung	Terdapat tiga tersangka, yakni mantan kepala sekolah AS, bendahara sekolah AN dan EFR dari pihak swasta yang terjerat pada kasus dana BOS. Dalam kasus itu, diduga para tersangka menyalahgunakan dana BOS sebesar Rp 664 juta. Pola operasi yang diterapkan oleh AS cs dalam praktik korupsi tersebut direalisasikan melalui penganggaran proyek fiktif yang dilanjutkan dengan manipulasi <i>markup</i> anggaran dana BOS di SMAN 10 Bandung. Tindakan tersebut dilaksanakan pada periode ketika sekolah menerima pencairan dana BOS sejumlah Rp 2,2 miliar pada tahun 2020.

Sumber: <https://www.detik.com/jabar/berita/d-7407883/disdik-jabar-soal-kepsek-sman-10-bandung-tersangka-korupsi-sudah-pensiun>

Sumber : diolah oleh peneliti (2026)

Dari perspektif audit internal, terlihat bahwa fungsi pengawasan internal di sekolah belum berjalan efektif. Idealnya, audit internal di lingkungan pendidikan dilakukan oleh unit seperti Satuan Pengawas Internal (SPI) di tingkat dinas atau inspektorat daerah. Namun, dalam kasus-kasus tersebut, audit internal bersifat reaktif, bukan preventif. Misalnya, pada kasus SMPN 9 Ambon dan SDN 23 Maluku Tengah, penyimpangan berlangsung selama beberapa tahun tanpa terdeteksi lebih awal. Hal ini menunjukkan bahwa audit tidak berbasis risiko (*risk-based audit*), sehingga gagal mengidentifikasi area rawan seperti pengelolaan dana BOS yang bernilai besar. Selain itu, tidak terlaksananya audit berkala untuk semua sekolah yang mendalam serta lemahnya independensi auditor internal yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya *fraud*.

Dari sisi pengendalian internal, kelemahan yang paling menonjol adalah tidak adanya pemisahan tugas (*segregation of duties*). Dalam hampir semua kasus, kepala sekolah menguasai seluruh siklus keuangan mulai dari perencanaan (RKAS), pencairan dana, hingga pelaporan. Kondisi ini menunjukkan pelanggaran prinsip dasar pengendalian internal menurut kerangka COSO. Misalnya, pada kasus SDN 23 Maluku Tengah dan SMKN 2 Kisaran, bendahara cenderung berperan administratif tanpa kewenangan kontrol, bahkan tidak dilibatkan secara penuh. Selain itu, lemahnya sistem dokumentasi dan verifikasi memungkinkan munculnya laporan fiktif, seperti pada SMPN 1 Pallangga dan SMAN 10 Bandung. Tidak adanya transparansi kepada guru maupun komite sekolah juga memperburuk kondisi, karena menghilangkan mekanisme kontrol sosial (*social control*) yang seharusnya menjadi bagian dari *governance* sekolah.

Berdasarkan lima kasus tersebut, jika dilihat dari sisi *fraud triangle theory*, faktor *opportunity* yang paling dominan dalam terjadinya *fraud* dana BOS. Pada kasus SMP Negeri 9 Ambon, kepala sekolah bersama bendahara melakukan pengelolaan dana BOS secara tertutup tanpa melibatkan tim BOS maupun pihak sekolah lainnya. Praktik tersebut membuka *opportunity* karena tidak terdapat mekanisme pengawasan dan pembagian tugas yang jelas. Kasus SMK Negeri 2 Kisaran juga memperlihatkan dominasi Kepala sekolah yang melakukan pencairan dana tanpa transparansi dan tidak melibatkan tim BOS maupun komite sekolah. Kasus SD Negeri 23 Maluku Tengah juga memperlihatkan bahwa kepala sekolah mengambil alih seluruh proses pengelolaan dana BOS, mulai dari perencanaan, pencairan, hingga pelaporan tanpa melibatkan bendahara secara optimal. Sentralisasi kewenangan tersebut menciptakan *opportunity* yang sangat besar karena tidak terdapat mekanisme saling mengawasi (*checks and balances*). Situasi ini memperkuat perspektif *agency theory* bahwa ketimpangan informasi dan sentralisasi kewenangan dapat memunculkan moral *hazard* dalam organisasi sektor publik. Hasil ini mendukung penelitian Taihuttu dan Yanti (2025) yang menjelaskan bahwa konsentrasi kekuasaan dalam pengelolaan dana BOS meningkatkan risiko *abuse of authority* dan *fraud*. Selain itu, lemahnya monitoring menyebabkan *fraud* berlangsung dalam jangka waktu lama tanpa terdeteksi, sebagaimana terlihat pada kasus SMPN 9 Ambon dan SDN 23 Maluku Tengah. Selanjutnya *rationalization* muncul dalam bentuk justifikasi bahwa praktik tersebut “biasa terjadi” dalam instansi pendidikan. Ketidakpatuhan terhadap RKAS dan pengabaian prosedur administrasi yang terjadi di SMK Negeri 2 Kisaran telah mencerminkan adanya *rationalization*, yaitu pembenaran terhadap tindakan yang menyimpang dari ketentuan. Sejalan dengan itu, pada kasus SMP Negeri 1 Pallangga, rekayasa laporan pertanggungjawaban dan pengadaan fiktif juga menggambarkan *rationalization*, karena pelaku secara sengaja menciptakan dokumen sebagai legitimasi atas penyalahgunaan dana. Dan kasus SMP Negeri 23 Maluku Tengah yaitu pemalsuan tanda tangan dan penyusunan laporan

fiktif juga menunjukkan adanya *rationalization*, yaitu upaya membenarkan tindakan melalui manipulasi dokumen administrasi. Sementara itu, *pressure* berasal dari kebutuhan pribadi maupun tuntutan pencapaian target tertentu. Namun sayangnya pada kasus-kasus tersebut tidak dijelaskan secara eksplisit.

Kegagalan dalam mendeteksi *fraud* juga menunjukkan bahwa metode deteksi yang digunakan masih tradisional. Seharusnya, pendekatan modern seperti *data analytics* dapat digunakan untuk mendeteksi kejanggalkan transaksi seperti transaksi berulang dengan vendor yang sama atau nilai yang tidak wajar. Selain itu, tidak adanya *whistleblowing system* (WBS) yang efektif membuat potensi pelaporan dari pihak internal yaitu guru/staf tidak muncul, sehingga *fraud* berlangsung lebih lama tanpa terungkap.

Analisis berdasarkan COSO *framework* menunjukkan bahwa seluruh kasus mengalami kelemahan pada lima komponen utama pengendalian internal, yaitu:

Control environment

Efektivitas lingkungan pengendalian sangat bergantung pada komitmen pimpinan organisasi terhadap pentingnya pengendalian internal. Pada SMP Negeri 9 Ambon, SMK Negeri 2 Kisaran, dan SD Negeri 23 Maluku Tengah, kepala sekolah mendominasi pengelolaan dana BOS tanpa melibatkan tim BOS maupun pihak terkait. Kondisi tersebut mencerminkan tidak berjalannya prinsip pembagian wewenang dan akuntabilitas. Sementara itu, pada SMAN 10 Bandung dan SMP Negeri 1 Pallangga, keterlibatan beberapa pihak dalam penyusunan proyek dan laporan fiktif mengindikasikan bahwa lemahnya integritas organisasi tidak hanya terjadi pada individu, tetapi telah memengaruhi budaya kerja. Temuan ini menunjukkan bahwa lemahnya *control environment* menciptakan kondisi yang memungkinkan penyimpangan terjadi sejak awal proses pengelolaan dana BOS.

Risk assessment

Penilaian risiko menjadi komponen penting dalam sistem pengendalian internal karena memungkinkan organisasi untuk bersikap proaktif dalam menghadapi ketidakpastian dan menjaga keberlangsungan pencapaian tujuan organisasi. Kasus di SMK Negeri 2 Kisaran, penggunaan dana yang tidak sesuai RKAS dan tidak adanya LPJ mengindikasikan bahwa risiko ketidakpatuhan terhadap petunjuk teknis BOS tidak diantisipasi sejak tahap perencanaan. Pada SMP Negeri 1 Pallangga, transaksi dan pengadaan fiktif juga menunjukkan bahwa risiko penyalahgunaan pada proses pengadaan tidak diidentifikasi. Sementara itu, SMAN 10 Bandung memperlihatkan bahwa risiko proyek fiktif dan *markup* anggaran tidak terdeteksi meskipun melibatkan beberapa pihak. Pola tersebut menunjukkan bahwa proses penilaian risiko belum diterapkan secara efektif sehingga berbagai potensi penyimpangan berkembang menjadi *fraud*.

Control activities

Aktivitas pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang diterapkan untuk memastikan bahwa yang telah rencana berjalan dengan baik. Pada SMP Negeri 9 Ambon, kelemahan terlihat dari penyusunan laporan pembelanjaan fiktif dan manipulasi pembayaran honor. Pada SMK Negeri 2 Kisaran, pencairan dana dilakukan tanpa melibatkan Tim BOS maupun Komite Sekolah sehingga prosedur otorisasi dan pemisahan tugas tidak berjalan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa prosedur pengendalian internal belum mampu mencegah maupun mendeteksi penyimpangan.

Information and communication

Informasi dan komunikasi berperan dalam memastikan bahwa data yang relevan diperoleh, diproses, dan disampaikan secara tepat waktu kepada pihak yang membutuhkan. Berdasarkan hasil analisis, seluruh kasus menunjukkan kegagalan pada aspek ini. Pada SMP Negeri 9 Ambon, pengelolaan dana dilakukan secara tertutup sehingga informasi penggunaan dana tidak diketahui oleh Tim BOS. Kondisi serupa terjadi di SMK Negeri 2 Kisaran, di mana pencairan dana hanya diketahui oleh kepala sekolah dan bendahara tanpa melibatkan Tim BOS maupun Komite Sekolah. Pada SMP Negeri 1 Pallangga, laporan pertanggungjawaban memuat transaksi fiktif sehingga informasi yang disampaikan tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Temuan tersebut menunjukkan bahwa lemahnya transparansi dan komunikasi menyebabkan informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan dan pengawasan menjadi tidak andal sehingga meningkatkan risiko *fraud*.

Monitoring activities

Aktivitas pemantauan dilakukan untuk menilai kualitas pelaksanaan pengendalian internal sekaligus mendeteksi kelemahan yang memerlukan perbaikan. Kasus SMP Negeri 9 Ambon yang dimana penyimpangan berlangsung selama empat tahun tanpa terdeteksi dan kasus SMK Negeri 2 Kisaran yaitu penggunaan dana yang tidak sesuai RKAS dan tidak adanya LPJ menunjukkan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan program BOS tidak dilakukan secara memadai. Pada SMP Negeri 1 Pallangga, transaksi dan pengadaan fiktif dapat berlangsung karena tidak terdapat evaluasi yang mampu memverifikasi kesesuaian antara laporan dan kondisi riil. Pola tersebut menunjukkan bahwa mekanisme monitoring internal belum mampu mendeteksi penyimpangan secara dini sehingga *fraud* berlangsung dalam periode yang cukup lama.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *fraud* dana BOS merupakan bentuk *failed governance* dalam pengelolaan keuangan pendidikan yang ditandai oleh lemahnya pengendalian internal, tidak efektifnya audit internal, serta rendahnya transparansi dan akuntabilitas organisasi. Temuan ini sejalan dengan penelitian Asmapane et al (2024), Damayanti dan Primastiwi (2021), serta Haurissa dan Dewi (2021) yang menegaskan bahwa kegagalan sistem pengendalian dan lemahnya tata kelola organisasi menjadi penyebab utama meningkatnya risiko *fraud* pada sektor publik. Selain itu, Efendi et al. (2024) dan Herawaty et al (2021) menjelaskan bahwa budaya organisasi yang permisif serta lemahnya independensi audit internal memperbesar peluang terjadinya penyimpangan karena fungsi pengawasan tidak berjalan optimal. Penelitian Ginting et al. (2025) juga memperkuat temuan ini bahwa rendahnya kemampuan *fraud* detection dan lemahnya independensi auditor menyebabkan *fraud* sulit terdeteksi sejak dini. Dengan demikian, kasus *fraud* dana BOS tidak dapat dipandang semata sebagai perilaku individu, tetapi merupakan konsekuensi dari *failed governance* yang mencerminkan kegagalan sistem pengawasan, kontrol organisasi, dan budaya integritas dalam lembaga pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pada tiga aspek utama yaitu peningkatan kualitas audit internal yang independen dan berbasis risiko, penerapan pengendalian internal yang ketat (terutama pemisahan tugas dan transparansi), serta implementasi sistem deteksi *fraud* berbasis teknologi dan pelaporan (WBS). Tanpa perbaikan sistemik tersebut, potensi terjadinya kasus serupa akan tetap tinggi di masa mendatang.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa *governance failure* dalam pengelolaan dana BOS terjadi akibat lemahnya pengendalian internal, rendahnya transparansi, serta belum optimalnya fungsi audit internal dalam mendukung pengawasan keuangan sekolah. Berdasarkan

perspektif COSO *framework*, kelemahan pada *control environment*, *control activities*, dan *monitoring activities* menyebabkan mekanisme kontrol dan deteksi dini terhadap penyimpangan belum berjalan efektif. Sementara itu, berdasarkan *fraud triangle theory*, faktor *opportunity* menjadi faktor paling dominan karena adanya sentralisasi kewenangan dan lemahnya sistem pengawasan, sedangkan *pressure* dan *rationalization* turut memperkuat terjadinya *fraud* dalam pengelolaan dana BOS. Implikasi penelitian menekankan pentingnya penguatan audit berbasis risiko, transparansi pengelolaan dana pendidikan, serta penerapan *whistleblowing system* dan *data analytics* sebagai upaya pencegahan *fraud*. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan pendekatan empiris untuk menguji efektivitas sistem pengendalian internal dan audit internal terhadap pencegahan *fraud* dana BOS secara lebih mendalam

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno. (2019). *Auditing: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ambon Terkini News. (2026). Korupsi dana bos, kepek SMPN 9 Ambon dituntut 9 tahun penjara. https://ambonterkini.id/news_read/korupsi-dana-bos-kepek-smpn-9-ambon-dituntut-9-ta-4731
- Amin, A., Darwanis, D., & Yusmita, F. (2023). Factors affecting *fraudulent* management of school operational assistance (bos) funds at public high schools. *JRAK*, 15(2), 233–247. <https://doi.org/10.23969/jrak.v15i2.6631>
- Amin, N. W., Indriani, E., & Mariadi, Y. (2022). Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) pada sekolah dasar di kecamatan mataram tahun 2021. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 2(1), 166-174. <https://doi.org/10.17509/jtkp.v4i2.61437>
- Arens, A. A., Elder, R. J., Beasley, M. S., & Hogan, C. E. (2017). *Auditing and assurance services: An integrated approach* (16th ed.). England: Pearson.
- Asmapane, S., Deviyanti, D. R., Norsita, M., & Wulandari, D. (2024). The effect of internal control system implementation and compensation suitability on *fraud* prevention with inspectorate examination as an intervening variable. *Journal of World Science*, 3(7), 849–859. <https://doi.org/10.58344/jws.v3i7.682>
- Asrini. (2026). *Audit modern & fraud detection: Perspektif perilaku dan teknologi*. Gorontalo: Cahaya Arsh Publisher.
- Carolina, Y., & Haneda, J. (2022). COSO ERM and the role of internal auditors in *fraud* prevention. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 14(2), 233–248. <https://doi.org/10.17509/jaset.v14i2.48834>
- Damayanti, A. F., & Primastiwi, A. (2021). Pengaruh pengendalian internal, good corporate governance, dan sistem pengukuran kinerja terhadap pencegahan *fraud*. *Invoice: Jurnal Ilmu Akuntansi*, 3(2), 231–245. <https://doi.org/10.26618/inv.v3i2.6029>
- Detik Jabar. (2024). Disdik Jabar soal kepek SMAN 10 Bandung tersangka korupsi: Sudah pensiun. <https://www.detik.com/jabar/berita/d-7407883/disdik-jabar-soal-kepek-sman-10-bandung-tersangka-korupsi-sudah-pensiun>
- Detik Sumut. (2023). Korupsi dana BOS Rp 900 juta, eks kepek SMK 2 Kisaran dituntut 7 tahun bui. <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6665228/korupsi-dana-bos-rp-900-juta-eks-kepek-smk-2-kisaran-dituntut-7-tahun-bui>
- Ditia, D. P. T., Pebriora, I. D., Delin, N. P., & Widyawati, S. (2026). Pelanggaran Yang Terjadi Pada Penyalahgunaan Dana Boss Sekolah. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 2(1), 64–68.

- Efendi, H. I., Sayekti, Y., & Irmadariyani, R. (2024). Organizational culture, internal auditors, and *fraud* prevention with internal control and good corporate governance as intervening. *WIGA: Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi*, 14(1), 114–123.
- Ginting, N. A., Koeswayo, P. S., & Sukmadilaga, C. (2025). *Fraud* detection in the government sector (An empirical study on the Audit Board of the Republic of Indonesia). *E-Jurnal Akuntansi*, 35(4). <https://doi.org/10.24843/EJA.2025.v35.i04.p15>
- Hakim, L. N., & Suryatimur, K. P. (2022). Efektivitas peran audit internal dalam pencegahan *fraud*. *JIAKES: Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 10(3), 523–532.
- Haurissa, N. F., & Dewi, C. N. (2021). *Fraud* di pemerintahan: Analisis meta studi di Indonesia. *Perspektif Akuntansi*, 4(3), 297–319. <https://doi.org/10.24246/persi.v4i3.p297-319>
- Herawaty, N., Haryadi, H., Arum, E. D. P., & Rahayu, S. (2021). Internal auditors' quality as a mediation variable in *fraud* prevention in the government of Jambi Province. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 9(3), 279–288. <https://doi.org/10.22437/ppd.v9i3.11378>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2025). Temuan SPI pendidikan 2024: 12% dana BOS tak sesuai peruntukan. <https://kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/temuan-spi-pendidikan-2024-12-dana-bos-tak-sesuai-peruntukan>
- Liputan Malteng. (2025). Jaksa tetapkan kepala SD Negeri 23 Malteng 'S.A.T' sebagai tersangka korupsi dana BOS. https://malteng.liputan.co.id/article_read/jaksa-tetapkan-kepala-sd-negeri-23-malteng-s-a-t-s1762865755
- Louwers, T. J., Blay, A. D., Sinason, D. H., Strawser, J. R., & Thibodeau, J. C. (2018). *Auditing & assurances services*. New York: McGraw-Hill Education.
- Lubis, H. Z., Sari, M., & Ramadhany, A. A. (2024). Effect of internal audit, internal control, and audit quality on *fraud* prevention: Evidence from the public sector in Indonesia. *Problems And Perspectives in Management*, 22(2), 201–214. [10.21511/ppm.22\(2\).2024.04](https://doi.org/10.21511/ppm.22(2).2024.04)
- Melinda, D., Nurhayati, E., & Purnama, D. (2023). Pengaruh budaya organisasi, pengendalian internal, proactive *fraud* audit dan *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana BOS. *Jurnal Riset Keuangan dan Akuntansi (JRKA)*, 9(1), 196–206.
- Metro TV News. (2025). Tilap dana BOS Rp1,3 miliar, Kejari Gowa tahan kepek SMPN 1 Pallangga. <https://www.metrotvnews.com/read/NP6C3xea-tilap-dana-bos-rp1-3-miliar-kejari-gowa-tahan-kepek-smpn-1-pallangga>
- Moroney, R., Campbell, F., & Hamilton, J. (2017). *Auditing: A practical approach*. Australia: John Wiley & Sons Australia.
- Munifah. (2023). *Pengendalian internal sistem informasi*. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik.
- Nadirsyah, Indriani, M., & Mulyany, R. (2024). Enhancing *fraud* prevention and internal control: The key role of internal audit in public sector governance. *Cogent Business & Management*, 11(1), 1–18. <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2382389>
- Rahayu, S., Yudi, Y., Sofyan, S., & Rahayu, R. (2025). Enhancing good governance and *fraud* prevention for school performance. *Cogent Business & Management*, 12(1), 1–17.
- Rohman, A., Mukhibad, H., & Nurkhin, A. (2023). Religiosity and misuse of school aid funds: The development of the *fraud* theory. *International Journal of Evaluation and Research in Education*, 12(3), 1452–1461.
- Setiawan, R. A., & myas Sari, F. (2025). Pengaruh Kompetensi SDM, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, dan *Whistleblowing system* Terhadap Pencegahan *Fraud* Dalam Pengelolaan Dana BOSP. *Journal of Management and Economics Innovation*, 1(1), 1-18.



- Sofyani, H., Hasan, H. A., & Saleh, Z. (2022). Internal control implementation in higher education institutions: Determinants, obstacles and contributions toward governance practices and fraud mitigation. *Journal of Financial Crime*, 29(4), 1203–1220.
- Sudarmanto, et al. (2021). *Good Corporate Governance*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Taihuttu, A. L., & Yanti, Y. (2025). The mystery of misuse of school operational assistance funds: An in-depth analysis using the *fraud* hexagon. *International Journal of Economics and Management Research*, 3(1), 88–102.
- The Institute of Internal Auditors. (2026). *Definition of internal auditing*. <https://www.theiia.org/en/standards/what-are-the-standards/definition-of-internal-audit/>
- Widati, S., Setyawan, W., & Riyanah, S. (2023). School operational assistance fund (BOS) accounting information system as an internal control tool. *Accounting Information Systems and Information Technology Business Enterprise*, 8(2), 151–165. [10.34010/aisthebest.v8i2.11611](https://doi.org/10.34010/aisthebest.v8i2.11611).
- Wismawati, W., Anggraini, Y., & Agustintia, D. (2024). Efektivitas manajerial kepala sekolah dan peran audit internal dalam mencegah *fraud* pelaporan keuangan dana BOS melalui ARKAS. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Bisnis Digital, Ekonomi Kreatif, Entrepreneur (JEBDEKER)*, 5(1), 183-191. <https://doi.org/10.56456/jebdeker.v5i1.803>
- Yuningsi, Y., Kamase, H. P., Usman, R., & Masdar, R. (2026). The Effect of Internal Auditor Independence and Internal Control Systems on *Fraud* Prevention, with Institutional Environment as a Moderating Variable: A Study of Internal Auditors at the Buol Regency Inspectorate. *Electronic Journal of Education, Social Economics and Technology*, 7(1), 1-10. <https://doi.org/10.33122/ejeset.v7i1.1324>